

ABSTRAK

Beberapa produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Minna Padi Aset Manajemen (PT. MPAM) harus dibubarkan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena melanggar ketentuan yaitu menjanjikan imbalan yang pasti kepada investornya. Pasca pembubaran tersebut, PT. MPAM memberikan pernyataannya bahwa PT. MPAM hanya bisa mengembalikan 20% tunai, 30% berbentuk saham, dan 50% hangus. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang apakah keputusan pembagian hasil pembubaran Reksa Dana yang dilakukan PT. MAPM tidak bertentangan dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan investor terkait pembagian hasil pembubaran dari produk Reksa Dana tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis secara preskriptif yaitu menganalisis bahan hukum yang ada untuk diterapkan pada permasalahan yang ada, sehingga dapat memberikan preskripsi terhadap permasalahan hukum yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan untuk permasalahan diatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembagian hasil dari pembubaran produk Reksa Dana yang dilakukan PT. Minna Padi Aset Manajemen tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 47 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor atas permasalahan tersebut yaitu dapat dilakukan menggunakan upaya hukum keperdataan baik secara non-litigasi (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) maupun litigasi (melalui jalur pengadilan).

Kata kunci: Upaya hukum, investor, pembagian hasil pembubaran, produk reksa dana.

ABSTRACT

Some of the mutual funds managed by PT. Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) must be disbanded over the Financial Services Authority because breaking the regulation that promises a fixed return to their investor. After the dissolution, MPAM gave the statemen that MPAM can only return 20% in cash, 30% in kind, and 50% scorched. Related to that, it's necessary to research whether the distribution decision of the dissolution of the mutual funds is done by MPAM does not contradict as POJK Number 23/POJK.04/2016 and legal action that can be carried to related the distribution of the decision.

This research is normative research by using the statute approach and legal material. The legal material includes primary material, secondary, and tertiary. The material was obtained, then will be analyzed prescriptive by analyzing existing legal material to be applied to existing cases, to provide a prescription of legal issues based on the provision of law that should be applied to the problem.

The results of the research show that the distribution of the dissolution of the mutual funds is done by MPAM could not be justified because it was contrary to article 47 POJK Number 23/POJK.04/2016 and legal action that can be carried out by the investor on the problem can be carried out using civil legal remedies both non-litigation (Alternative Dispute Resolution) and litigation (though the court).

Keywords: legal attempt, investor, the distribution of dissolution, mutual funds.